



PERANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TERPADU TRUSMI PLERED DI KABUPATEN CIREBON

Anggun Agustina¹⁾, Dahly Sukmapryandhika²⁾, Bunga Aprillia³⁾

1), 2), 3)Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon (Disbudpar) dalam pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Trusmi Plered, dilihat dari tiga dimensi menurut teori Levinson: norma, konsep, dan perilaku. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi dokumen, melibatkan informan dari Disbudpar, pelaku UMKM, pengrajin batik, serta wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Disbudpar belum optimal: regulasi dan pedoman formal belum spesifik, perencanaan strategis masih parsial, dan implementasi kegiatan sporadis sehingga dampak terhadap pengembangan kawasan dan pemberdayaan ekonomi kreatif lokal terbatas. Kesimpulannya, penguatan regulasi, integrasi strategi berbasis budaya, dan kolaborasi lintas sektor diperlukan agar Trusmi berkembang menjadi destinasi wisata budaya terpadu yang berkelanjutan, efektif, dan berdampak sosial-ekonomi nyata.

Kata Kunci: Dinas Kebudayaan dan Parawisata, Pengembangan, Wisata Terpadu, Trusmi Plered

Abstract

This study aims to analyze the role of the Cirebon Regency Tourism and Culture Office (Disbudpar) in developing the Trusmi Plered Integrated Tourism Area, viewed from three dimensions according to Levinson's role theory: norm, concept, and behavior. The study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, field observations, documentation, and document review, involving informants from Disbudpar, MSME actors, batik artisans, and tourists. The results indicate that Disbudpar's role is not yet optimal: formal regulations and guidelines are not specific, strategic planning is partial, and program implementation is sporadic, limiting the impact on area development and local creative economy empowerment. In conclusion, strengthening regulations, integrating culture-based strategies, and cross-sector collaboration are necessary for Trusmi to develop into a sustainable, effective, and socially and economically impactful cultural tourism destination.

Keywords: *Tourism and Culture Office, Development, Integrated Tourism, Trusmi Plered*

PENDAHULUAN

Pariwisata budaya merupakan sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal (Lusi & Anggriana, 2023). Konsep pariwisata budaya berkelanjutan menekankan bahwa pengembangan destinasi tidak hanya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menjaga kelestarian budaya, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat (Frans & Djunaid, 2025). Keberhasilan destinasi wisata budaya sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, sebagaimana dijelaskan dalam teori *community-based tourism* (Aryanto & Widayat, 2025).

Di Indonesia, keberagaman budaya lokal menjadi daya tarik utama sekaligus membuka peluang ekonomi melalui sektor kreatif (Octivaningsih et al., 2025). Salah satu contohnya adalah Kawasan Trusmi Plered di Kabupaten Cirebon, yang dikenal sebagai sentra batik tradisional dengan nilai historis, filosofis, dan religius. Kawasan ini berfungsi sebagai pusat produksi batik sekaligus destinasi wisata belanja dan edukasi budaya, di mana pengunjung dapat menyaksikan proses pembuatan batik secara langsung. Posisi strategisnya di jalur nasional dan dekat dengan pusat kota semakin memperkuat potensi Trusmi sebagai simpul pariwisata regional (Silvianingsih & Wijaya, 2024).

Secara kuantitatif, Trusmi menunjukkan potensi yang signifikan sebagai destinasi wisata budaya. Berdasarkan laporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon (2024), jumlah kunjungan wisatawan ke Kawasan Batik Trusmi meningkat dari 326 ribu orang pada 2021 menjadi 5.559 ribu pada 2024, menunjukkan tren pemulihan pasca-pandemi dan daya tarik wisata yang kuat. Selain itu, capaian administratif Disbudpar Kabupaten Cirebon, seperti peningkatan indeks kepuasan masyarakat (109% pada 2024) dan pertumbuhan nilai ekonomi kreatif (Rp584 juta pada 2024), menegaskan peran lembaga ini dalam mendukung pengembangan kawasan.

Trusmi juga memiliki posisi strategis secara kebijakan, ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), sehingga pengembangannya bukan hanya menjadi prioritas lokal, tetapi juga bagian dari strategi provinsi Jawa

Barat dalam penguatan destinasi wisata budaya dan ekonomi kreatif (Perda Kabupaten Cirebon No. 7 Tahun 2018; Perda Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2015; Masterplan Trusmi, 2020).

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan Trusmi menghadapi berbagai tantangan. Secara umum, destinasi wisata budaya kerap mengalami kendala infrastruktur, fasilitas, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan, yang jika tidak dikelola secara terintegrasi dapat menurunkan kenyamanan pengunjung, merusak lingkungan, serta gagal memberdayakan masyarakat lokal. Secara spesifik, tantangan di Trusmi mencakup keterbatasan fasilitas parkir, jalur yang kurang ramah, penataan pedagang kaki lima yang belum optimal, pengelolaan limbah batik yang belum sistematis, serta kelembagaan pengelolaan kawasan yang belum efektif.

Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon (Disbudpar) menjadi sangat penting dalam konteks ini. Berdasarkan laporan LKIP 2023 dan LKjIP 2024, Disbudpar menunjukkan capaian positif, seperti peningkatan indeks kepuasan masyarakat, penguatan ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya melalui kampung tematik. Namun, capaian administratif tersebut belum sepenuhnya tercermin di tingkat kawasan, sehingga efektivitas pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Trusmi Plered masih perlu dianalisis lebih mendalam.

Beberapa penelitian terdahulu menjadi rujukan penting untuk memahami konteks pengembangan kawasan wisata budaya. Saputra (2023) menemukan bahwa implementasi Perbup No. 79 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Batik Trusmi belum optimal, meskipun program sosialisasi, pelatihan, dan promosi digital telah dilaksanakan. (Agustin et al., 2024) menunjukkan bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum maksimal dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Persamaan penelitian terdahulu terletak pada fokus lokasi dan perhatian terhadap peran pemerintah, namun aspek pengelolaan kawasan wisata secara terpadu, termasuk koordinasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian budaya, masih belum dianalisis secara mendalam.

Penelitian ini memberikan kebaharuan (novelty) dengan menilai peran Disbudpar secara komprehensif, mulai dari aspek normatif, konseptual,

hingga perilaku nyata di lapangan. Fokusnya tidak hanya pada implementasi kebijakan, tetapi juga pada bagaimana Disbudpar menggerakkan masyarakat, membina pelaku ekonomi kreatif, dan menciptakan sinergi lintas sektor untuk mewujudkan pengembangan wisata budaya yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru dalam pemahaman peranan pemerintah daerah, khususnya Disbudpar, dalam pengembangan destinasi wisata terpadu berbasis budaya di Kabupaten Cirebon.

Untuk menganalisis peranan Disbudpar secara komprehensif, penelitian ini menggunakan teori peranan Levinson (dalam Soekanto, 2007). Teori ini menekankan tiga dimensi utama: norma dan aturan yang mengarahkan tindakan lembaga, konsep perilaku organisasi dalam menjalankan fungsi, dan tindakan nyata dalam menghadapi masalah sosial. Pendekatan ini relevan untuk menjelaskan bagaimana Disbudpar menjalankan fungsi strategisnya dalam pelestarian budaya, pemberdayaan UMKM batik, serta peningkatan kualitas destinasi wisata Trusmi Plered.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan Disbudpar Kabupaten Cirebon dalam pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Trusmi Plered, baik dari aspek normatif, konseptual, maupun perilaku aktual. Penelitian ini juga menilai kontribusi peranan Disbudpar terhadap pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif, pelestarian nilai budaya lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, sehingga pengembangan kawasan wisata budaya dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon (Disbudpar) dalam pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Trusmi Plered. Pendekatan ini berfokus untuk menggali bagaimana Disbudpar menjalankan peran normatif, konseptual, dan perilaku aktual sesuai kerangka teori peranan Levinson (dalam Soekanto, 2007)

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan

foto, dengan bantuan alat seperti laptop, smartphone, kamera, internet, serta kendaraan untuk ke lapangan. Unit analisis mencakup Disbudpar beserta pihak terkait, sementara informan dipilih purposive, meliputi kepala dinas, kepala bidang, pelaku UMKM batik, dan pengunjung. Triangulasi sumber digunakan untuk memastikan validitas data dan menggambarkan peran normatif, konseptual, dan perilaku Disbudpar secara menyeluruh.

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari studi pustaka, dokumen kebijakan, dan laporan perencanaan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman serta pendekatan Creswell, meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran Disbudpar dalam pengembangan pariwisata budaya di Trusmi Plered.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pariwisata Budaya di Trusmi Plered

Kawasan Trusmi Plered merupakan sentra batik tradisional yang menjadi ikon budaya Kabupaten Cirebon, dengan nilai historis, filosofis, dan religius yang kuat. Selain sebagai pusat produksi batik, kawasan ini berkembang sebagai destinasi wisata belanja, edukasi budaya, dan rekreasi masyarakat. Aktivitas di kawasan ini memadukan nilai ekonomi, budaya, dan sosial dalam satu kesatuan ruang, sehingga Trusmi tidak hanya berfungsi sebagai tempat kerja pengrajin batik, tetapi juga sebagai ruang interaksi antara produsen, pengunjung, dan masyarakat lokal.



Gambar 1. Kawasan Trusmi Plered

Secara geografis, Trusmi Plered mencakup lima desa: Trusmi Kulon, Trusmi Wetan, Gamel, Wotgali, dan Kalitengah, yang saling terhubung melalui produksi, distribusi, dan perdagangan batik. Aktivitas ekonomi didominasi lebih dari 500 unit usaha batik dengan lebih dari 1.000 pengrajin lokal yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat dan daerah. Jalan Syekh Datul Kahfi menjadi koridor utama yang menampung ratusan toko batik, galeri, dan tempat makan, sehingga membentuk citra kawasan sebagai destinasi wisata belanja yang hidup dan dinamis.

Kawasan Trusmi juga kaya atraksi budaya, seperti tradisi Memayu Buyut Trusmi, ritual Ganti Atap Sirap Makam Ki Buyut Trusmi, perayaan Mauludan, serta pertunjukan seni Tari Baksa dan musik Gong Renteng. Aktivitas pembuatan batik secara langsung menghadirkan pengalaman wisata edukatif bagi pengunjung, menjadikan wisatawan sebagai partisipan dalam proses kreatif membatik. Atraksi budaya ini memperkuat identitas kawasan sekaligus menjadi daya tarik wisata yang autentik dan edukatif.



Gambar 2. Potensi Atraksi Budaya

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan pariwisata budaya Trusmi menghadapi tantangan, seperti koordinasi antar lembaga yang masih sektoral, pengelolaan fasilitas publik, jalur pedestrian, parkir, penataan PKL, serta pengelolaan limbah batik. Peluang pengembangan mencakup penguatan kapasitas SDM, optimalisasi desa wisata melalui Riparkab, pengakuan produk budaya sebagai WBTb, serta pemanfaatan kuliner, tradisi, dan wisata religi sebagai daya tarik tambahan. Pendekatan

community-based tourism menjadi strategi penting untuk memberdayakan masyarakat, menjaga kelestarian budaya, dan memastikan pengembangan kawasan berjalan berkelanjutan.

Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Trusmi Plered di Kabupaten Cirebon

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon (Disbudpar) dalam pengembangan Kawasan Trusmi Plered masih bersifat normatif dan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi visual, dan studi dokumen kebijakan. Trusmi saat ini lebih dikenal sebagai pusat perdagangan batik dibanding destinasi wisata budaya terpadu, dengan fasilitas pendukung seperti pusat informasi, ruang edukasi budaya, dan zona atraksi seni yang belum memadai. Hambatan utama terlihat pada aspek normatif karena belum adanya regulasi resmi seperti RIPPARKAB atau Perda, ditambah alokasi anggaran terbatas dan SDM Disbudpar yang kurang optimal.

Selain kendala regulasi dan anggaran, koordinasi lintas sektor juga belum berjalan efektif. Pengembangan kawasan seharusnya melibatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi dan UMKM, PUPR, serta Lingkungan Hidup, namun kolaborasi ini masih lemah. Beberapa program seperti Cirebon Katon Festival, pelatihan digital marketing, dan studi banding UMKM hanya menjangkau sebagian kecil pelaku usaha. Masyarakat lokal bahkan mengambil inisiatif sendiri, misalnya mengumpulkan iuran sopir bus wisata untuk menarik kunjungan. Masterplan pengembangan kawasan Trusmi sempat digagas, termasuk rencana “Malioboronya Cirebon”, namun belum terealisasi karena belum ada tindak lanjut dan alokasi anggaran.

Analisis penelitian difokuskan pada tiga dimensi peranan Disbudpar, yaitu norma (dasar hukum dan regulasi), konsep (perencanaan dan strategi), dan perilaku (implementasi nyata serta dampak sosial-ekonomi). Dimensi norma menekankan keberadaan dasar hukum dan kebijakan, dimensi konsep menitikberatkan pada perencanaan dan arah pengembangan kawasan, sementara dimensi perilaku menggambarkan implementasi program di lapangan dan dampaknya terhadap masyarakat (Soekanto, 2007).

Pendekatan tiga dimensi ini membantu memahami secara menyeluruh bagaimana Disbudpar menjalankan peranannya dalam mengembangkan kawasan Trusmi Plered.

Berikut uraian hasil penelitian dari ketiga dimensi peranan Disbudpar dalam pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Trusmi:

1. Peranan Sebagai Norma

Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon (Disbudpar) dalam pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Trusmi Plered sebagai norma berkaitan erat dengan dasar hukum, kebijakan, pedoman kerja kelembagaan, serta landasan institusional yang menjadi pijakan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam konteks ini, peranan sebagai norma mencerminkan bagaimana Disbudpar menerjemahkan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam kerangka regulasi dan program pengembangan pariwisata budaya yang sesuai dengan karakteristik lokal. Kawasan Trusmi, sebagai sentra batik utama di Kabupaten Cirebon, memerlukan regulasi yang jelas agar pengembangan wisata budaya dapat berjalan terarah dan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Disbudpar menunjukkan bahwa hingga saat ini belum tersedia dokumen perencanaan utama berupa RIPPARKAB atau RIPPARDA yang secara spesifik menetapkan Trusmi sebagai kawasan prioritas wisata terpadu. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan program pengembangan masih bersifat sektoral dan terbatas, hanya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon dan Renstra Disbudpar 2025–2029, yang belum mengangkat Trusmi secara eksplisit. Hal ini berdampak pada keterbatasan ruang gerak dinas untuk merancang kebijakan berkelanjutan atau melakukan pengembangan kawasan secara maksimal. Tanpa landasan hukum yang kuat, penyusunan program tahunan dan alokasi anggaran menjadi sangat terbatas.

Kemudian, wawancara dengan Subbagian Perencanaan dan Kepala Bidang Promosi menegaskan bahwa koordinasi internal dan lintas sektor belum optimal. Setiap unit kerja masih cenderung menyusun program secara sektoral berdasarkan tupoksi masing-masing, sementara forum

koordinasi seperti Musrenbang belum mampu menyelaraskan seluruh bidang menjadi satu kerangka pengembangan terpadu. Hal ini diperparah oleh ketiadaan arahan formal atau dokumen teknis yang menetapkan Trusmi sebagai kawasan wisata strategis, sehingga pengembangan hanya bersifat *ad hoc*, misalnya dukungan terhadap event tahunan, pelatihan UMKM, atau pameran sementara tanpa arah kebijakan jangka panjang.

Dari perspektif pelaku UMKM, ketidakjelasan regulasi juga menyebabkan minimnya pendampingan dan koordinasi dari pemerintah. Sebagian besar pelaku usaha mengaku hanya mengikuti kegiatan promosi atau event secara sporadis tanpa memperoleh arahan strategis untuk pengembangan usaha atau kawasan secara keseluruhan. Hal serupa diamini oleh wisatawan yang menilai Trusmi lebih tampak sebagai pusat perdagangan batik biasa, dengan fasilitas dan penataan yang belum menonjolkan identitasnya sebagai destinasi wisata budaya resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pondasi kelembagaan dan regulasi masih lemah, sehingga peranan Disbudpar sebagai norma belum efektif dalam membangun kerangka legal dan struktural yang mendukung pengembangan kawasan.

Dengan demikian, peranan Disbudpar sebagai norma harus diperkuat melalui penyusunan regulasi formal, baik melalui Perda maupun SK Bupati, yang secara eksplisit menetapkan Trusmi sebagai kawasan wisata terpadu berbasis budaya. Selain itu, pembentukan tim lintas sektor yang diformalkan dalam struktur kelembagaan menjadi langkah penting agar pengembangan kawasan dapat dilakukan secara terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan dasar hukum bagi perencanaan, penganggaran, dan implementasi program yang menyentuh seluruh pelaku UMKM dan masyarakat lokal.

2. Peranan Sebagai Konsep

Peranan Disbudpar Kabupaten Cirebon sebagai konsep mencerminkan sejauh mana strategi, perencanaan, dan pendekatan organisasi dijalankan untuk mengoptimalkan potensi Kawasan Wisata Terpadu Trusmi Plered. Dimensi ini menekankan pemikiran strategis dalam merancang program yang terintegrasi antara pengembangan

budaya, ekonomi lokal, dan partisipasi masyarakat. Konsep peranan harus dapat diterjemahkan ke dalam kerangka kerja yang jelas, model partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan potensi lokal, terutama pengrajin batik sebagai ikon utama kawasan. Analisis terhadap konsep ini penting untuk menilai kesiapan Disbudpar dalam menerapkan visi dan misi pembangunan pariwisata secara operasional.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Disbudpar, arah pengembangan Trusmi telah dibayangkan melalui gagasan strategis, termasuk ide menjadikan kawasan ini sebagai “Malioboronya Cirebon”. Namun, konsep tersebut belum terealisasi karena keterbatasan regulasi formal, alokasi anggaran yang tidak jelas, dan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi yang ambigu. Analisis menunjukkan bahwa meski terdapat visi strategis, tanpa landasan hukum yang kuat dan kepastian sumber daya, konsep peranan masih berada pada level gagasan, sehingga belum dapat dijadikan kerangka operasional untuk pengembangan kawasan.

Dari sisi teknis perencanaan, wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menegaskan bahwa konsep pengembangan diarahkan pada basis budaya lokal, termasuk pusat produksi batik, edukasi, atraksi budaya, dan pelibatan komunitas. Analisis menunjukkan bahwa meski perencanaan konseptual sudah mempertimbangkan elemen lokal dan partisipasi masyarakat, implementasi di lapangan masih fragmentaris. Program yang dijalankan hanya bersifat parsial, seperti dukungan pada event atau pelatihan teknis, dan belum menyentuh pembangunan kawasan secara menyeluruh. Hal ini menandakan gap antara perencanaan konseptual dan realisasi operasional.

Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif mencoba memperkuat citra Trusmi melalui kegiatan pelatihan digital marketing, pameran UMKM, dan studi banding ke daerah lain. Analisis dari hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun ada upaya promosi strategis, tanpa dokumen perencanaan terpadu, efeknya terhadap pertumbuhan kawasan masih terbatas. Gap antara niat strategis dan implementasi nyata terlihat

kelas, karena kegiatan promosi tidak disertai roadmap pengembangan kawasan atau integrasi program lintas bidang, sehingga hasilnya kurang maksimal dalam mendukung tujuan konsep yang telah dirancang.

Keterlibatan pelaku UMKM dan masyarakat Trusmi dalam proses perencanaan masih minim. Analisis dari wawancara pelaku UMKM menegaskan bahwa sebagian besar kegiatan pemerintah bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan, sehingga masyarakat mengambil inisiatif sendiri untuk menjaga aliran wisatawan dan mempertahankan aktivitas ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pemerintah belum menembus level partisipasi masyarakat secara memadai, sehingga keberlanjutan pengembangan kawasan sangat bergantung pada inisiatif individu atau komunitas lokal.

Fasilitas pendukung untuk pengalaman wisata terpadu di Trusmi masih terbatas, seperti galeri resmi, atraksi budaya, pusat informasi, dan signage yang memadai. Berdasarkan wawancara dengan wisatawan, kondisi ini menyebabkan kawasan lebih tampak sebagai pasar batik daripada destinasi wisata budaya terpadu. Analisis menunjukkan bahwa peranan konsep pemerintah belum diterjemahkan menjadi pengalaman wisata nyata yang bisa dirasakan pengunjung. Akibatnya, potensi kawasan baik dari sisi ekonomi maupun budaya belum dioptimalkan, dan integrasi antara konsep strategis dan implementasi masih lemah.

Secara keseluruhan, peranan sebagai konsep dari Disbudpar sudah mulai terbentuk melalui gagasan dan masterplan awal, namun masih lemah dalam hal perencanaan strategis dan koordinasi lintas sektor. Analisis menunjukkan bahwa keterbatasan regulasi, roadmap pembangunan, dan minimnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama. Penguatan perencanaan partisipatif, sinergi antar-bidang, serta kepastian regulasi dan anggaran diperlukan agar Trusmi dapat dikembangkan secara terpadu, berkelanjutan, dan selaras dengan potensi budaya dan ekonomi lokal

3. Peranan Sebagai Perilaku

Peranan sebagai perilaku mengacu pada tindakan nyata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon dalam

mengelola, mengembangkan, dan memberdayakan Kawasan Wisata Terpadu Trusmi Plered. Dimensi ini menilai tidak hanya keberadaan program, tetapi juga efektivitas pelaksanaan, kolaborasi antar-pihak, serta dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pengrajin, pelaku UMKM, dan wisatawan. Dengan kata lain, peranan perilaku menjadi tolok ukur seberapa jauh kebijakan dan rencana strategis dapat diterjemahkan ke lapangan. Evaluasi terhadap tindakan ini penting untuk menilai kualitas implementasi kebijakan dan arah pembangunan kawasan wisata secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber termasuk Kepala Disbudpar Cirebon dan Kepala Bidang Destinasi, dan Industri Pariwisata menunjukkan bahwa tindakan pemerintah masih berada pada tahap inisiasi dan cenderung *ad hoc*. Beberapa kegiatan seperti festival budaya, pelatihan digital marketing, dan penyediaan kios bagi pengrajin telah dilakukan, tetapi sifatnya sporadis dan belum rutin. Sistem pengelolaan kawasan yang terpadu belum terbentuk, sehingga terjadi kesenjangan antara kebijakan formal dan implementasi nyata. Kondisi ini menyebabkan potensi Trusmi sebagai destinasi wisata terpadu belum optimal dimanfaatkan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.

Keterbatasan tersebut berkaitan dengan sejumlah faktor struktural yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan. Pertama, anggaran dan regulasi yang belum memadai membatasi kapasitas Disbudpar untuk mengelola program secara fokus. Kedua, kawasan Trusmi belum menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga kegiatan bersifat reaktif dan sebagian besar mengikuti agenda umum. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia di lapangan menghambat kemampuan dinas untuk melakukan intervensi langsung dan berkelanjutan. Faktor-faktor ini menegaskan perlunya strategi perencanaan yang lebih fokus dan terukur.

Dampak dari kondisi ini terlihat jelas pada pelaku UMKM lokal. Dukungan pemerintah sebagian besar terbatas pada penyediaan fasilitas fisik, sedangkan aspek promosi, pendampingan, dan pemberdayaan

berkelanjutan minim. Oleh karenanya, pengrajin dan pedagang harus mengambil inisiatif sendiri untuk menarik wisatawan, misalnya melalui iuran sukarela untuk sopir bus pariwisata. Fenomena ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan kawasan masih parsial, sehingga tanggung jawab pembangunan ekonomi lokal sebagian besar berada pada masyarakat itu sendiri, bukan pada kebijakan pemerintah secara sistematis.

Dari perspektif wisatawan, kunjungan ke Trusmi lebih bersifat komersial daripada edukatif atau rekreatif. Kurangnya fasilitas pendukung, seperti petunjuk wisata, toilet umum, dan pusat informasi, menandakan bahwa konsep wisata berbasis budaya belum terealisasi secara utuh. Hal ini menunjukkan lemahnya integrasi antara program pemerintah, kebutuhan pasar, dan pengalaman pengunjung. Akibatnya, daya tarik kawasan dan potensi ekonomi lokal tidak berkembang maksimal, sehingga peluang untuk menciptakan ekosistem wisata yang berkelanjutan menjadi terbatas.

Analisis internal kelembagaan menunjukkan bahwa sistem evaluasi Disbudpar masih bersifat umum dan belum spesifik untuk Trusmi. Evaluasi yang ada tidak mengukur efektivitas program secara terfokus, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak memiliki mekanisme tindak lanjut yang berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan bahwa peranan perilaku pemerintah belum strategis dan koordinatif, sehingga pengembangan kawasan tidak dapat mencapai potensi optimal. Kurangnya indikator kinerja khusus untuk Trusmi membuat evaluasi program bersifat parsial dan fragmentaris.

Secara keseluruhan, peranan sebagai perilaku Disbudpar menunjukkan upaya awal yang simbolik, dengan dampak sosial ekonomi yang terbatas. Strategi pengembangan masih fragmentaris, koordinasi antar-pihak lemah, dan pengawasan implementasi belum terstruktur. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan sistematis agar keberlanjutan program dan peningkatan dampak lokal dapat terwujud. Trusmi belum sepenuhnya menjadi destinasi wisata budaya terpadu yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan wisatawan.

Berdasarkan analisis kebijakan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diambil sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan berbasis masyarakat untuk meningkatkan sense of ownership dan partisipasi lokal.
2. Penguatan promosi digital dan pembangunan infrastruktur wisata untuk memperluas daya tarik dan aksesibilitas kawasan.
3. Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, mentoring, dan insentif berkelanjutan agar ekonomi lokal tumbuh mandiri. Keempat, pembentukan satuan tugas khusus Trusmi dan penetapan prioritas kawasan dalam dokumen perencanaan daerah agar pelaksanaan program terarah dan terukur.

Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, peranan pemerintah diharapkan tidak hanya bersifat ad hoc, tetapi mampu mentransformasikan Trusmi menjadi destinasi wisata terpadu yang berkelanjutan. Upaya ini akan memberikan dampak sosial ekonomi nyata, memperkuat identitas budaya lokal, dan memastikan bahwa setiap kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan konkret yang dirasakan oleh masyarakat dan wisatawan secara langsung. Strategi semacam ini juga menjadi dasar bagi pengembangan ekosistem wisata yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Teori peranan menurut Levinson menekankan bahwa setiap organisasi atau individu memiliki peran yang terdiri dari norma, konsep, dan perilaku, yang saling berkaitan untuk memastikan fungsi dan tujuan tercapai secara efektif (Soekanto, 2007; Sumiati et al., 2025). Dalam konteks Disbudpar Kabupaten Cirebon, peranan sebagai norma terlihat melalui dasar hukum, kebijakan, dan pedoman kelembagaan yang menjadi pijakan pengelolaan Kawasan Wisata Trusmi. Analisis temuan menunjukkan bahwa lemahnya regulasi formal dan koordinasi lintas sektor menyebabkan pengembangan Trusmi bersifat ad hoc dan sektoral.

Hal tersebut sejalan dengan konsep Levinson bahwa norma berfungsi sebagai landasan bagi tindakan strategis yang artinya tanpa kepastian hukum dan arahan formal, implementasi konsep dan perilaku menjadi terfragmentasi, sehingga peran organisasi belum optimal dalam membangun

kerangka legal dan struktural yang mendukung tujuan pariwisata. sejalan dengan kajian terdahulu yang menyebutkan bahwa dasar hukum dan kebijakan yang jelas menjadi faktor penting dalam efektivitas peran organisasi (Izziyana et al., 2022; Mutmainah et al., 2022). Tanpa norma yang kokoh, implementasi konsep dan perilaku menjadi terfragmentasi, sehingga tujuan pembangunan pariwisata budaya belum dapat diwujudkan secara optimal (Wijaya et al., 2024).

Peranan sebagai konsep dan perilaku menunjukkan hubungan antara visi strategis dan tindakan nyata. Levinson menekankan bahwa konsep harus dapat diterjemahkan ke dalam program operasional, sementara perilaku menjadi indikator nyata dari implementasi konsep tersebut (Soekanto, 2007). Analisis hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa meskipun Disbudpar telah memiliki gagasan strategis seperti masterplan berbasis budaya dan ekonomi lokal, implementasi di lapangan masih sporadis, fragmentaris, dan bergantung pada inisiatif masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan strategis dan eksekusi nyata untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Dananjaya & Pratiwi, 2025; Satria, 2023). Dengan demikian, penerapan teori Levinson menekankan perlunya sinergi antara norma, konsep, dan perilaku melalui regulasi formal, perencanaan strategis, dan tindakan nyata yang terukur agar pengembangan Trusmi dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dalam pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Trusmi Plered masih belum optimal. Dari dimensi norma, regulasi dan pedoman formal yang spesifik untuk Trusmi belum tersedia, sehingga koordinasi internal dan perencanaan program bersifat sektoral dan ad hoc. Dari dimensi konsep, gagasan pengembangan kawasan telah ada, namun implementasi strategis masih terbatas, tidak berkelanjutan, dan minim partisipasi masyarakat. Sedangkan dari dimensi

perilaku, tindakan nyata yang dilakukan, seperti event dan pelatihan, belum cukup berdampak bagi pelaku UMKM maupun pengembangan kawasan, sehingga Trusmi belum sepenuhnya menjadi destinasi wisata budaya terpadu yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Disbudpar perlu segera menyusun regulasi dan dokumen perencanaan resmi untuk Trusmi sebagai dasar hukum pengembangan kawasan. Strategi pengembangan harus berbasis potensi lokal dan budaya batik, mengintegrasikan perdagangan, edukasi, pelestarian budaya, dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor, termasuk pelaku UMKM dan komunitas kreatif, perlu diperkuat agar pengembangan kawasan berlangsung menyeluruh dan berkelanjutan, memberikan dampak nyata bagi ekonomi, sosial, dan budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., Siddha, A., & Septiansyah, B. (2024). Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Di Desa Wisata Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. *Praxis Idealist : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
- Aryanto, S. D., & Widayat, T. N. E. (2025). Kolaborasi Media Sosial Dalam Mendukung Keberhasilan Desa Wisata Studi Kasus Desa Wisata Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul. *Social : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 630–638. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5730>
- Dananjaya, A. G., & Pratiwi, W. D. (2025). Integrasi Perencanaan Wilayah Dan Pariwisata : Studi Kasus Pengembangan Villa Di Lembang. *Jurnal Regional Planning*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.36985/dwz93t07>
- Frans, F., & Djunaid, I. S. (2025). Strategi Pengembangan untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Pantai Nemberala Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(7), 8273–8280. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i7.9178>
- Izziyana, W. V., Nurwati, N., Rimbawan, A. Y., & Fitri, L. (2022). Aktualisasi Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisata Nasional.

- Borobudur Law and Society Journal*, 1(5), 28–35.
<https://doi.org/10.31603/8650>
- Lusi, N. M. P., & Anggriana, P. R. (2023). Pengaruh Program Desa Wisata Terhadap Perkembangan Ekonomi Desa Dan Pelestarian Budaya Lokal. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 50–63.
<https://doi.org/10.35724/sjias.v12i1.4870>
- Mutmainah, N., Ahyani, H., & Putra, H. M. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 15–42. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art2>
- Octivaningsih, A. R., Sabir, M., Nurjanna, L., Asminar, M., & Andriya, R. (2025). Pengembangan Pariwisata Ekonomi Kreatif Terpadu Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 6885–6894.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2883>
- Saputra, D. R. (2023). *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Pengelolaan Wisata Budaya Batik Trusmi Sebagai Daya Tarik Wisata Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas Pokok Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga*. Semarang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Satria, A. (2023). Analisis Keberlanjutan Lingkungan dalam Pengembangan Sektor Pariwisata: Perspektif Ekonomi Lingkungan di Destinasi Wisata. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(1), 16–23. <https://doi.org/10.61787/0vgy2953>
- Silvianingsih, S., & Wijaya, A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Industri Batik Trusmi di Desa Trusmi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 11354–11364.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.5946>
- Soekanto. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumiati, I., Putro, F. N., Aqilah, D. W., & Putri, N. A. (2025). Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Dalam Penanggulangan Masalah Narkotika Di Kalangan Remaja Demi Meningkatkan Usia

Produktif. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 1–10.

Wijaya, I. K. K. A., Senastri, N. M. J., & Suryani, L. P. (2024). Dinamika Pengelolaan Wisata Religi di Nusa Penida: Tinjauan Hukum Dan Peluang. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.4967>